

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Papua yaitu adanya temuan hasil pemeriksaan BPKP, terhadap kualitas laporan keuangan, adanya penggunaan aset yang tidak transparan dalam laporan keuangan.

Otonomi Khusus daerah Provinsi Papua memberikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang otonomi khusus daerah Nomor. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Perubahan signifikan dalam reformasi di sektor keuangan pemerintah adalah perubahan yang transparan dan akuntabel di bidang akuntansi pemerintahan, yang kemudian menjadi salah satu isu utama pemerintahan yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi pemerintahan. yaitu reformasi pemerintahan, prinsip akuntansi dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk memberikan pedoman.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (*accrual basis*). Direktur Jendral Keuangan Daerah, Yuswandi A. Temenggung, menyatakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditandatangani mengharuskan pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) per 1 Januari 2015. Dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual adalah PP Nomor. 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), sebagai amanat dari UU Nomor. 17/2003 tentang Keuangan Negara. UU

Nomor.17/2013 mengamanatkan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam PP Nomor. 71/2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada awal tahun 2015.

Sementara itu, beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di daerah, yakni ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Kemendagri, 2014). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP / *Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT / *Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW / *Adverse opinion*).

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang terdapat di Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang informasinya memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, disajikan tepat waktu, dan lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pengguna mengambil keputusan yang lebih berkualitas.

Laporan keuangan yang andal adalah laporan keuangan yang disajikan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan di dalam laporan keuangan, dapat diuji lebih dari satu kali

dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan tidak merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Laporan keuangan dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan dengan entitas lain pada umumnya. Laporan keuangan mudah dipahami adalah laporan keuangan yang dapat dipahami dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya. Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penggunaan prinsip-prinsip yang tertera pada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Indra Bastian (2010)

Standar Akuntansi Pemerintahan terkait penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dimasa lalu dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya.

Pernyataan 01 standar akuntansi pemerintahan (SAP) menyatakan penyajian laporan keuangan harus disajikan secara terstruktur dan juga informasi harus diidentifikasi secara jelas. Penerapan 01 SAP membuat laporan keuangan dapat dibandingkan dan mudah dipahami, sehingga semakin baik penerapan SAP membuat kualitas laporan keuangan menjadi meningkat. Suwita dan Arnan (2015), Sudirianti dkk (2015), dan Ichlas dkk (2014) telah membuktikan bahwa tingginya penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut PP Nomor. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Mulyadi (2017) menjelaskan bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung system pengendalian yang memadai. Pengertian Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (Mulyadi, 2017). Definisi pengendalian intern menurut Sujarweni (2015) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian intern menurut IAPI (2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Nurillah dan Muid (2014) mendefinisikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan

teknologi informasi yaitu komputer dan jaringan internet dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi agar dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan juga komputerisasi yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Ketika kesalahan pencatatan dapat diminimalisir dan penyajian laporan keuangan dapat lebih dipercepat membuat laporan keuangan semakin andal dan relevan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) dan Yosefrinaldi (2013) telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan teknologi informasi akuntansi menggunakan SIMAKDA dalam penyusunan laporan keuangan akan mempermudah penyusunan laporan keuangan bagi Pemerintah provinsi papua sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Penggunaan Sistem SIMAKDA selama beberapa tahun terakhir pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua yang dirancang khusus oleh pemerintah pusat untuk proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan Perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

Fitriana, (2012) menyatakan bahwa Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Ini juga termasuk dari perspektif pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif. Serta Ketersediaan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Selain variable teknologi informasi, maka variable lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah variable kompetensi sumber daya manusia.

Sementara itu, Menurut J Jaenudin (2019) kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya. SDM yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar dan membuat laporan keuangan relevan dan andal, sehingga semakin baik kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

Pada sisi lain pendapat, Nurillah dan Muid (2014) dan Hadiputro dan Octavia (2015) telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu penggunaan peraturan pemerintah Nomor. 60 tahun 2008 dalam instansi pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam menerapkan kode etik dan melakukan penilaian risiko untuk mengendalikan lingkungan internal. Dalam pernyataan lingkungan pengendalian, instansi pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan menerapkan kode etik secara tertulis dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan transaksi – transaksi yang benar terjadi sehingga informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur/wajar dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan andal sehingga semakin baik penerapan SPIP maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani dan Setiawina (2016) dan Nurillah dan Muid (2014) telah membuktikan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2010 secara lengkap dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal sehingga semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Nurillah dan Muid (2014) telah membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat dari Lokasi Penelitian, Tahun Penelitian, Variabel yang di teliti dan Hasil dari penelitian tersebut.

Berdasarkan pada uraian fenomena tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang lebih mendalam dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Papua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua?
2. Apakah penerapan system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan, antara lain :

1. Bagi BPKAD Provinsi Papua.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan faktor Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pemanfaatan teknologi Informasi yang berpengaruh terhadap kinerja Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak, baik untuk pimpinan dan manajemen organisasi dalam mengembangkan kinerja pegawai, sehingga pegawai dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang akan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi.
- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pegawai dan organisasi ketika lembaga/organisasi melakukan pembaharuan program untuk kemajuan organisasi.

2. Bagi peneliti

Memberikan kesempatan untuk menerapkan teori akuntansi secara langsung atau di lapangan. Selain itu memberikan kemampuan dalam melakukan penelitian, sehingga memberikan pengalaman serta ilmu bagi peneliti dan juga menjadi bahan perbandingan bagi peneliti untuk implementasi teori kedalam praktek akuntansi.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menjadi sumber referensi atau bahan literatur bagi yang membutuhkan dalam mengembangkan

organisasi dengan salah satunya memperbaiki kinerja pegawai pada BPKAD dan juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi yang ingin meneliti masalah dan variabel yang sama dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika urutan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti dapat memaparkan latar belakang permasalahan berupa yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini serta tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini peneliti dapat menyajikan beberapa sub bab penting yaitu kajian Pustaka, Pengembangan Hipotesis serta Metode Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian berisikan uraian tentang lokasi penelitian, metode yang digunakan, Populasi dan sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Operasional Variabel dan Metode Analisis.